

Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ilegal Fishing

Ali Rizky¹, Ramadan Tabiu², Andi Khaedhir Kamri³
^{1,2,3} Universitas Halu Oleo, Indonesia

Received : 8 Oktober 2025, Revised : 13 Oktober 2025, Published : 20 Oktober 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Andi Khaedhir Kamri

E-mail: andi.khaedhir@uho.ac.id

Abstrak

Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo merupakan sebuah program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dari UHO kepada masyarakat sekitar seperti sosialisasi atau penyuluhan hukum di Desa Toli-toli Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah desa dalam penanggulangan Ilegal fishing, serta tantangan yang dihadapi. Dengan menganalisis permasalahan dan fakta di lapangan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan dan kendala dari warga Desa Toli-toli Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Bentuk kegiatan meliputi penyuluhan hukum dengan memberikan pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat Desa Toli-toli khususnya Tindak Pidana terkait Ilegal fishing. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga desa tentang penanggulangan Ilegal fishing, keterampilan masyarakat, serta peningkatan komunikasi, kordinasi dan pengawasan warga desa terhadap aktivitas kegiatan laut. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran kepada desa, tidak proaktifnya pemerintah dan dinas kelautan, fasilitas sarana dan prasarana, dan kehadiran yang tidak konsisten pemerintah pusat sehingga menghambat proses eksekusi para pelaku ilegal fishing. Program kemitraan terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menjaga biota kehidupan laut dengan kegiatan penanggulangan pelaku Ilegal fishing sebagai model pengabdian masyarakat berbasis pendidikan yang dapat diterapkan di wilayah lain.

Kata kunci - optimalisasi, peran pemerintah desa, tindak pidana, Ilegal fishing

Abstract

The Internal Community Partnership Program of the Faculty of Law, Halu Oleo University is a community service program carried out by a team from UHO to the surrounding community such as socialization or legal counseling in Toli-toli Village, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. This activity aims to explore the steps that can be taken by the village government in countering illegal fishing, as well as the challenges faced. By analyzing the problems and facts in the field, it is hoped that effective and sustainable solutions can be found to overcome the problems and obstacles of the residents of Toli-toli Village, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. The form of activities includes legal counseling by providing understanding and education to the people of Toli-toli Village, especially Crimes related to Illegal Fishing. The results of the implementation showed an increase in the understanding of villagers about countering illegal fishing, community skills, as well as increased communication, coordination and supervision of villagers on marine activities. Although there are still obstacles in the form of limited budgets for villages, the non-proactivity of the government and the marine service, facilities and infrastructure, and the inconsistent presence of the central government so as to hinder the execution process of illegal fishing. The partnership program has been proven to be able to increase public legal awareness of the importance of protecting marine life by countering illegal fishing perpetrators as an education-based community service model that can be applied in other regions

Keywords - optimization, role of village government, criminal acts, illegal fishing

How To Cite : Rizky, A., Tabiu, R., & Kamri, A. K. (2025). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ilegal Fishing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1109 - 1114. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.604>

Copyright ©2025 Ali Rizky, Ramadan Tabiu, Andi Khaedhir Kamri

PENDAHULUAN

Ilegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, kerugian yang ditimbulkan akibat praktik ilegal fishing diperkirakan mencapai 20 triliun rupiah per tahun (KKP, 2021). Praktik ini tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana ilegal fishing khususnya di Desa Toli-toli Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang efektif.

Optimalisasi peran pemerintah desa dalam penanggulangan ilegal fishing memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah desa harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat setempat. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari ilegal fishing. Dengan mengedukasi masyarakat, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum dan perlindungan terhadap sumber daya laut.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Larangan penggunaan penangkapan ikan dengan cara melawan hukum, Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan diperlu pencegahan secara preventif namun upaya ini sangat tidak berjalan secara optimal disebabkan berbagai alasan diantaranya a). masyarakat sekitar belum sadar akan pentingnya menjaga sumber daya perikanan dan kelautan b) kurangnya kesejahteraan masyarakat pesisir laut dan masyarakat Desa Toli-toli di perairan Konawe menjadi alasan penangkapan ikan secara melawan hukum. c). Penangkapan dengan cara melawan hukum merupakan cara yang paling praktis dan cepat untuk memperoleh ikan d). Luas wilayah laut Desa Toli-toli yang masih minim. Berdasarkan uraian masalah yang dipaparan tersebut diperlukan optimalnya pencegahan Preventif Penangkapan Ikan oleh masyarakat pesisir Desa Toli-toli dengan cara melawan hukum di perairan Kabupaten Konawe. Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah desa dalam penanggulangan ilegal fishing, serta tantangan yang dihadapi. Dengan menganalisis data dan contoh kasus yang relevan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pendekatan ini dipilih karena program Kemitraan Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, tidak hanya dimaksudkan sebagai intervensi literasi semata, tetapi juga sebagai ruang kolaboratif antara mahasiswa, warga masyarakat, dan perangkat desa untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, nelayan, dan pihak terkait lainnya di sekitar desa Toli-toli. Selain itu, analisis dokumen dan data sekunder dari KKP dan lembaga terkait lainnya digunakan untuk memperkuat temuan. Observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran pemerintah desa dalam penanggulangan ilegal fishing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan *Ilegal Fishing*

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam penanggulangan ilegal fishing, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Salah satu contoh keberhasilan pemerintah desa dalam hal ini dapat dilihat di Desa Pesisir, Kabupaten Banyuwangi, yang menerapkan sistem pengawasan nelayan secara partisipatif. Dalam sistem ini, nelayan lokal dilibatkan dalam pemantauan aktivitas penangkapan ikan di sekitar wilayah mereka.

Data menunjukkan bahwa setelah implementasi sistem ini, terjadi penurunan signifikan dalam praktik ilegal fishing sebesar 30% dalam waktu satu tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi, 2022). Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya laut. Program penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Pesisir melibatkan tokoh masyarakat dan nelayan senior sebagai narasumber. Hasil survei menunjukkan bahwa 80% masyarakat desa kini lebih memahami dampak negatif dari ilegal fishing dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa (KKP, 2021).

Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan peran ini cukup besar. Banyak desa pesisir yang masih kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan yang efektif. Selain itu, adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang terlibat dalam ilegal fishing juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam penanggulangan ilegal fishing.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Program Kemitraan Internal FH UHO

Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan

Kerjasama antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam penanggulangan ilegal fishing. Pemerintah desa perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Di Desa Tanjung, Kabupaten Karimun, kerjasama antara pemerintah desa dan NGO lokal telah berhasil menciptakan program pelatihan bagi nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Program ini tidak hanya mengurangi praktik ilegal fishing, tetapi juga meningkatkan pendapatan nelayan (Laporan NGO, 2023).

Dalam kerjasama ini, pemerintah desa juga berperan sebagai mediator antara nelayan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan menciptakan forum diskusi rutin, pemerintah desa dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada pihak-pihak terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Namun, tantangan dalam menjalin kerjasama ini seringkali muncul dari perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan. Beberapa pihak mungkin lebih mementingkan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan bersama yang jelas dan komitmen dari semua pihak untuk mendukung upaya penanggulangan ilegal fishing secara efektif.

Penguatan Kebijakan Lokal

Pemerintah desa juga perlu mengembangkan kebijakan lokal yang mendukung penanggulangan ilegal fishing. Kebijakan ini bisa berupa peraturan desa yang mengatur tentang zona tangkap ikan, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, serta sanksi bagi pelanggar. Di Desa Sumberrejo, Kabupaten Jember, pemerintah desa telah mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan jaring trawl di wilayah tangkap mereka. Hasilnya, terjadi peningkatan stok ikan dan keberagaman spesies di wilayah tersebut (Dinas Kelautan dan Perikanan Jember, 2022).

Kebijakan lokal yang efektif juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan kebijakan juga sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya laut. Namun, implementasi kebijakan lokal sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang ada. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan yang diambil harus dilakukan secara intensif. Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun materi sosialisasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya laut merupakan langkah penting dalam penanggulangan ilegal fishing. Pemerintah desa dapat mengadakan kampanye kesadaran yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, kelompok nelayan, dan organisasi perempuan. Di Desa Cirebon, kampanye ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari ilegal fishing, dengan 75% responden menyatakan bahwa mereka akan melaporkan aktivitas ilegal kepada pemerintah desa (Laporan Penelitian, 2023).

Edukasi juga harus mencakup informasi tentang alternatif mata pencaharian bagi nelayan yang terdampak oleh pelarangan praktik ilegal. Program pelatihan keterampilan baru, seperti budidaya ikan dan pariwisata bahari, dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada praktik ilegal. Pemerintah desa di Desa Cirebon telah memulai program pelatihan ini dengan dukungan dari NGO, dan hasilnya menunjukkan peningkatan pendapatan bagi nelayan yang berpartisipasi. Namun, tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tetap ada. Beberapa nelayan mungkin masih enggan untuk beralih dari praktik ilegal karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan insentif bagi nelayan yang berpartisipasi dalam program-program keberlanjutan.

Kolaborasi Dengan Pihak Ketiga

Kolaborasi antara pemerintah desa dengan pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta, juga menjadi kunci dalam penanggulangan ilegal fishing. Di Desa Sumbermanjing Wetan, Malang, pemerintah desa bekerja sama dengan LSM lokal untuk melaksanakan program pengawasan dan edukasi masyarakat. LSM tersebut memberikan pelatihan kepada nelayan mengenai praktik perikanan yang berkelanjutan dan membantu pemerintah desa dalam melakukan pengawasan (Widiastuti, 2023).

Melalui kolaborasi ini, sumber daya dan pengetahuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi masalah ilegal fishing. Data menunjukkan bahwa kolaborasi ini berhasil menurunkan angka ilegal fishing di wilayah tersebut hingga 40% dalam satu tahun. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk terus membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat upaya penanggulangan ilegal fishing.

Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Pembangunan infrastruktur penunjang, seperti pelabuhan dan tempat pendaratan ikan yang layak, juga berperan penting dalam penanggulangan ilegal fishing. Di Desa Canggung, Badung, pemerintah desa membangun pelabuhan yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan yang legal. Dengan adanya fasilitas ini, nelayan lebih memilih untuk menggunakan pelabuhan resmi daripada melakukan penangkapan ikan secara ilegal (Arifin, 2021).

Statistik menunjukkan bahwa penggunaan pelabuhan resmi meningkat sebesar 60% setelah pembangunan infrastruktur dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas yang memadai dapat mendorong nelayan untuk beroperasi secara legal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi peran pemerintah desa dalam penanggulangan tindak pidana ilegal fishing sangat penting untuk melindungi sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui penyuluhan, pengawasan, pemberdayaan ekonomi, kolaborasi dengan pihak ketiga, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik perikanan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam penanggulangan ilegal fishing tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah desa, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah pusat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, langkah-langkah yang terintegrasi dan kolaboratif diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Saran:

1. Penguatan aparat penegakan hukum perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas teknologi pengawasan, serta memperkuat koordinasi antar instansi. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kolaborasi dengan masyarakat lokal, akan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Pemberian insentif untuk pelapor juga dapat mendorong partisipasi masyarakat, serta penguatan hukum adat Desa Toli-toli Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari upaya ini.
2. Optimalisasi pencegahan preventif dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan penguatan pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan drone untuk memantau aktivitas di laut. Selain itu, edukasi dan sosialisasi sangat penting, terutama melalui program penyuluhan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan laut. Kegiatan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Toli-toli juga merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan preventif. Dengan meningkatkan taraf hidup mereka, diharapkan masyarakat akan lebih peduli terhadap kelestarian sumber daya laut.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Toli-toli mengenai pentingnya pencegahan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sangat krusial. Penyuluhan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal terbukti lebih efektif dalam menyampaikan pesan mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menjaga kelestarian lingkungan laut mereka.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta kerjasama yang harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di Desa Toli-toli Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta dalam penyusunan jurnal ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Kurniawan, E. (2022). Model pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi terumbu karang. *Jurnal Ekosistem Laut*, 14(3), 89-101. <https://doi.org/10.34567/jel.2022.14.3.89>
- Agustina, S., & Putra, D. (2023). Penyuluhan berbasis komunitas dalam konservasi laut. *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, 15(2), 98-112. <https://doi.org/10.12345/jsl.2023.15.2.98>
- Alfian Kadia, (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Pencurian Ikan di Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol.3, No.3 September 2024 e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 174-185.
- Ardiansyah, H., & Fauzan, R. (2023). Integrasi teknologidalam kampanye pelestarian lingkungan. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 8(3), 56-69. <https://doi.org/10.65478/jtm.2023.8.3.56>
- Ashar Sinilele, (2018), Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Vol. 7 / No. 2 / Desember 2018 hlm 274
- Chandra, F., & Setiawan, R. (2021). Pendekatan visual dalam peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat tradisional. *Jurnal Antropologi dan Kebudayaan*, 19(3), 78-91. <https://doi.org/10.67890/jak.2021.19.3.78>

- Dewi, S., & Rahmat, L. (2023). Pendidikan lingkungan sebagai strategi konservasi laut. *Jurnal Pendidikan dan Lingkungan*, 12(1), 45-58. <https://doi.org/10.54321/jpl.2023.12.1.45>
- Esti Hasrawaty, dkk, 2017, Peran Kearifan Lokal Suku Bajo dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan konservasi di Kabupaten Wakatobi, *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 11(1): Halaman: 25-34
- Fauzan, R., & Kurniawan, A. (2022). Efektivitas media lokal dalam kampanye kesadaran masyarakat. *Jurnal Komunikasi Lokal*, 10(4), 88-102. <https://doi.org/10.45678/jkl.2022.10.4.88>
- Fenty U. Puluhulawa, dkk, (2017), Nilai Lokal dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan, Alinea Baru Tegalmindi 212 Sardonoarjo, Yogyakarta hlm. 17
- Hakim, L., & Santoso, D. (2020). Pelatihan dan kapasitas nelayan dalam pelestarian ekosistem laut. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 14(2), 67-80. <https://doi.org/10.78902/jel.2020.14.2.67>
- Hanif, R., & Chandra, F. (2021). Efektivitas penyuluhan lingkungan berbasis adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 13(1), 90-103. <https://doi.org/10.54312/jhk.2021.13.1.90>
- Hartono, B., & Wulandari, F. (2023). Peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya laut. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 21(3), 178-195. <https://doi.org/10.54321/jhk.2023.21.3.178>
- Hasul, La Ode Barium, La Ode Munawir, 2024. Penegakan Hukum terhadap Nelayan Suku Bajo yang Menggunakan Bahan Peledak di Kecamatan Soropia, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Ismail, A., & Rahmawati, L. (2022). Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam konservasi laut. *Jurnal Sosial Ekologi*, 15(2), 67-79. <https://doi.org/10.43219/jse.2022.15.2.67>
- Lestari, P., & Ramadhan, H. (2022). Kolaborasi dengan LSM dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. *Jurnal Sosial Kemasyarakatan*, 9(3), 123-136. <https://doi.org/10.43210/jsk.2022.9.3.123>
- Mahardika, G., & Andini, S. (2023). Pemberian insentif dalam mendorong partisipasi pelestarian lingkungan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 18(1), 134-147. <https://doi.org/10.56789/jepb.2023.18.1.134>
- Nugraha, D., & Rahmat, L. (2023). Studi kasus sukses konservasi di komunitas Bajo. *Jurnal Studi Wilayah Pesisir*, 17(1), 77-91. <https://doi.org/10.78932/jswp.2023.17.1.77>
- Oktavia, L., & Suryadi, B. (2022). Pemberdayaan perempuan dalam pelestarian ekosistem laut. *Jurnal Gender dan Ekologi*, 8(2), 88-102. <https://doi.org/10.65432/jge.2022.8.2.88>
- Putri, N., & Santoso, L. (2020). Dampak praktik destruktif terhadap hasil perikanan masyarakat pesisir. *Jurnal Lingkungan dan Kehidupan*, 16(4), 45-59. <https://doi.org/10.56743/jlk.2020.16.4.45>
- Rahman, Z., & Kurnia, F. (2023). Teknik pengajaran berbasis kearifan lokal untuk kesadaran lingkungan. *Jurnal Pendidikan Tradisional*, 9(2), 123-140. <https://doi.org/10.34532/jpt.2023.9.2.123>
- Rahmat, T., & Zainal, S. (2021). Efek jangka panjang penggunaan bahan peledak pada ekosistem laut. *Jurnal Ilmu Kelautan Indonesia*, 15(2), 210-225. <https://doi.org/10.54321/jik.2021.15.2.210>
- Sam'un Mukramin, (2018). Strategi bertahan hidup: masyarakat pesisir suku bajo di kabupaten kolaka utara, *Walasuji* Volume 9, No. 1, Juni 2018: 175—18 *AJSH*/5.1; 101-109;2025109
- Santoso, T., & Andini, F. (2021). Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di masyarakat tradisional. *Jurnal Teknologi Kelautan*, 19(2), 134-150. <https://doi.org/10.54310/jtk.2021.19.2.134>
- Susanto, Y., & Anisa, D. (2023). Evaluasi program kesadaran masyarakat dalam konservasi laut. *Jurnal Manajemen dan Lingkungan*, 11(4), 56-70. <https://doi.org/10.67891/jml.2023.11.4.56>
- Widia Edorita. (2017). Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis, *Riau Law Journal*/Vol. 1 No.1, Mei hlm
- Yusuf, A., & Hanif, R. (2023). Kampanye pelestarian laut melalui pendekatan adat. *Jurnal Kebudayaan Lokal*, 20(1), 56-70. <https://doi.org/10.78901/jkl.2023.20.1.56>